



Kementerian PPN/  
Bappenas



ICCTF

Indonesia Climate Change Trust Fund



# PEDOMAN PENANDAAN ANGGARAN EKONOMI BIRU

EDISI 1

# 2024



# **Pedoman Penandanaan Anggaran Ekonomi Biru**

EDISI 1



# Kata Pengantar

**P**uji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Pedoman Penandaan Anggaran Ekonomi Biru ini. Dokumen ini disusun sebagai panduan teknis untuk seluruh Kementerian dan Lembaga dalam melaksanakan penandaan anggaran yang berfokus pada intervensi ekonomi biru. Pedoman ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan upaya pelestarian lingkungan hidup yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ekonomi biru menjadi landasan bagi transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan tangguh. Melalui penandaan anggaran yang terstruktur, Kementerian PPN/Bappenas berharap dapat meningkatkan akuntabilitas serta memastikan bahwa alokasi anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung ekonomi biru dapat tercapai secara tepat sasaran dan efisien.

Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu dalam memahami kluster dan sub-kluster *dynamic tagging* ekonomi biru, identifikasi RO yang relevan, penerapan dalam aplikasi KRISNA serta membantu, memantau, dan mengevaluasi capaian intervensi ekonomi biru secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan adanya pemantauan yang lebih baik, kita dapat mengidentifikasi area perbaikan dan penguatan pada pelaksanaan program yang berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, penandaan ini memungkinkan terwujudnya sinergi lintas sektor serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan implementasi ekonomi biru di seluruh wilayah Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan pedoman ini. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan dan mengoptimalkan anggaran ekonomi biru demi kemakmuran bangsa dan keberlanjutan ekosistem laut kita di masa mendatang.



Jakarta, 2024

**Moh. Rahmat Mulianda**  
Direktur Kelautan  
dan Perikanan  
Kementerian PPN/  
Bappenas



# Tim Penyusun

## **PENGARAH**

Leonardo A.A.T Sambodo

## **PENANGGUNG JAWAB**

Moh. Rahmat Mulianda

## **TIM PENYUSUN BAPPENAS**

Setyawati

Lelly Hasni Pertamawati

Lilieek Sofitri

Kemal Pramayuda

Muhammad Brilliant Nugraha

Muhammad Ariq Rifqi Alfarisy

Hendro Tri Utomo

© 2025

Didukung oleh Indonesia Climate Change Trust Fund melalui Proyek LAUTRA





# Daftar Isi

Kata Pengantar	01
Daftar Tabel	05
Daftar Gambar	06

## BAB Pendahuluan 07

<b>1</b>	1.1 Latar Belakang	08
	1.2 Tujuan Pedoman	08
	1.3 Ruang Lingkup	08
	1.4 Landasan Hukum	09

## BAB Ekonomi Biru di Indonesia 10

<b>2</b>	2.1 Ekonomi Biru dalam Pembangunan Nasional Indonesia	11
	2.1.1 Ekonomi Biru dalam RPJPN 2025–2045	11
	2.1.2 Ekonomi Biru dalam Peta Jalan Ekonomi 2023–2045	11
	2.1.3 Ekonomi Biru pada RPJMN 2025–2029	12
	2.2 Intervensi Kebijakan Ekonomi Biru	13
	2.3 Integrasi Ekonomi Biru dalam Proses Perencanaan Pembangunan	14

## BAB Penandaan Anggaran Ekonomi Biru 16

<b>3</b>	3.1 Tujuan Penandaan Anggaran Ekonomi Biru	17
	3.2 Klaster dan Sub Klaster Dynamic Tagging Ekonomi Biru	17
	3.3 Penandaan Anggaran pada Level Rincian Output	22
	3.4 Waktu dan Proses Penandaan	24
	3.5 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Penandaan Anggaran Ekonomi Biru	24
	3.6 Identifikasi Rincian Output yang Mendukung Ekonomi Biru	25

## BAB Penandaan Anggaran di Sistem KRISNA 26

<b>4</b>	4.1 KRISNA Renja Tagging	27
	4.2 Posisi Dynamic Tagging pada Renja K/L	28

## BAB Tata Cara Penandaan Anggaran pada Penyusunan RENJA K/L dalam Sistem Informasi KRISNA Renja K/L 30

<b>5</b>	Tata Cara Penandaan Anggaran pada Penyusunan RENJA K/L dalam Sistem Informasi KRISNA Renja K/L	30
----------	--	----

## BAB Penutup 34

<b>6</b>	Penutup	34
----------	---------	----

# Daftar Tabel

**Tabel 1.**  
**Daftar Dynamic Tagging**

**Tabel 2.**  
**Kategorisasi Klaster dan Sub Klaster Ekonomi Biru pada Penandaan Anggaran di KRISNA**

**Tabel 3.**  
**Peran dan Tanggung Jawab dalam Penandaan Anggaran Ekonomi Biru**



# Daftar Gambar

**Gambar 1.**  
Visi dan Misi Indonesia untuk Tahun 2045 dalam Peta Jalan Ekonomi Biru 2023–2045

**Gambar 2.**  
Integrasi Ekonomi Biru dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJMN 2025–2029

**Gambar 3.**  
Struktur Data Renja K/L pada Aplikasi Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)

**Gambar 4.**  
Ilustrasi Penandaan Rincian Output yang Mendukung Ekonomi Biru

**Gambar 5.**  
Penandaan Anggaran di Sistem KRISNA

**Gambar 6.**  
Posisi Dynamic Tagging pada Renja K/L

**Gambar 7.**  
Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (1): Halaman Log pada Sistem KRISNA

**Gambar 8.**  
Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (2): Tahun Anggaran RENJA K/L

**Gambar 9.**  
Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (3): Menu Program dan Kegiatan

**Gambar 10.**  
Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (4): Contoh Urutan Daftar Program K/L

**Gambar 11.**  
Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (5): Contoh Urutan Daftar Kegiatan dan Kode Kegiatan K/L

**Gambar 12.**  
Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (6): Contoh Pemilihan KRO

**Gambar 13.**  
Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (7): Daftar Rincian Output (RO) dan Kode RO

**Gambar 14.**  
Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (8): Pemilihan Tagging Dynamic Ekonomi Biru



Bab  
1

PENDAHULUAN

## 1.1

## Latar Belakang

Ekonomi biru menyeimbangkan dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi. Keseimbangan interaksi antara kedua aspek tersebut jika dilakukan dengan bijak membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Ekonomi biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, ekonomi biru juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi pertumbuhan ekonomi.

Sehingga, ekonomi biru dijadikan sebagai salah satu landasan transformasi ekonomi Indonesia dalam rencana pembangunan jangka panjang dua puluh tahun kedepan. Pengembangan ekonomi biru di Indonesia dipandu dengan visi "Sumber daya pesisir dan laut kita yang beragam dikelola secara berkelanjutan melalui ekonomi biru yang berbasis pengetahuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi, memastikan lingkungan laut yang sehat, dan memperkuat ketahanan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan."

Visi ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan empat misi, yaitu;

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan;
2. Menjamin laut yang sehat, tangguh, dan produktif;
3. Meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama; dan
4. Menciptakan lingkungan pemampuan.

Dalam perencanaan pembangunan, ekonomi biru telah diintegrasikan ke dalam kerangka pembangunan jangka menengah RPJMN 2025-2029 terutama melalui program Asta Cita 2, Asta Cita 3, Asta Cita 5 dan Asta Cita 8. Selain itu, ekonomi biru juga dapat mendukung Asta Cita 4 dan Asta Cita 6. Untuk memudahkan proses identifikasi program ekonomi biru, maka diperlukan *dynamic tagging* ekonomi biru. *Dynamic tagging* ekonomi biru dimaksudkan untuk dapat mengetahui jumlah alokasi anggaran yang dialokasikan untuk Pengembangan Ekonomi Biru, mengidentifikasi Program/Proyek Prioritas Nasional yang dapat dijadikan *underlying project* untuk Bond/Sukuk Biru, serta melakukan pemantauan (*e-monev*) terhadap realisasi anggaran yang berhubungan dengan Ekonomi Biru.

## 1.2

## Tujuan Pedoman

Pedoman Penandaan Anggaran Ekonomi Biru ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam melakukan penandaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran Ekonomi Biru pada tingkat keluaran kegiatan (rincian output) di dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renja (K/L) tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L)

## 1.3

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ekonomi biru ini meliputi penjelasan tentang:

1. Ekonomi biru dalam pembangunan nasional Indonesia
2. Proses identifikasi dan penandaan RO yang mendukung upaya pencapaian target ekonomi biru serta indikator ekonomi biru dalam Rencana Kerja K/L
3. Definisi dari masing-masing sektor-sub sektor *dynamic tagging* Ekonomi Biru

4. Proses penelaahan RO yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu sesuai dengan lingkup tanggung jawab tugas, pokok dan fungsi masing-masing
5. Proses monitoring dan evaluasi ekonomi biru yang diselenggarakan oleh PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait sesuai dengan lingkup tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi masing-masing

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah





Bab  
2

EKONOMI BIRU  
DI INDONESIA

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi ekonomi biru yang sangat besar. Potensi ini mencakup perikanan, pariwisata bahari, energi laut, industri maritim, dan jasa lingkungan berbasis ekosistem laut (KKP, 2022). Ekonomi biru di Indonesia merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan laut (Bappenas, 2021). Ekonomi biru berfokus pada keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi ekosistem laut,

serta memastikan sumber daya laut tetap produktif untuk generasi mendatang. Pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang lebih lestari dan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan ekonomi biru, Pemerintah Indonesia telah menuangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, merumuskan peta jalan ekonomi biru dan menerapkan program ekonomi biru ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2025–2029

### 2.1.1 Ekonomi Biru dalam RPJPN 2025–2045

Ekonomi biru merupakan bagian dari landasan transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ekonomi Biru pada RPJPN 2025–2045

Pembangunan Indonesia pada jangka panjang 20 tahun telah mencanangkan arah kebijakan pembangunan ekonomi biru. Dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025–2045 pembangunan ekonomi biru diarahkan pada

1. Penguatan ekosistem pendukung termasuk sinkronisasi kebijakan, tata kelola dan kelembagaan, regulasi, dan blue financing;
2. Peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor *existing/tradisional* dan mendorong pengembangan pada sektor-sektor baru;
3. Penguatan riset, inovasi, dan SDM terampil untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi biru;
4. Peningkatan kesehatan, ketahanan, dan produktivitas sumber daya kemaritiman, termasuk dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Peningkatan dan pemerataan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi biru;
6. Optimalisasi pemanfaatan SLoC dan ALKI sebagai jalur logistik, transportasi, dan perdagangan global;
7. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

### 2.1.2 Ekonomi Biru dalam Peta Jalan Ekonomi 2023–2045

Berdasarkan peta jalan ekonomi biru Indonesia, visi pengembangan Ekonomi Biru di Indonesia pada tahun 2045 adalah untuk mewujudkan “Sumber daya pesisir dan laut Indonesia yang beragam dikelola secara berkelanjutan melalui ekonomi biru berbasis pengetahuan untuk menciptakan kemakmuran sosial-ekonomi, memastikan lingkungan laut yang sehat, dan memperkuat ketahanan demi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang”.



**Gambar 1.** Visi dan Misi Indonesia untuk Tahun 2045 dalam Peta Jalan Ekonomi Biru 2023-2045

Dalam peta jalan ekonomi biru 2023-2045 telah ditetapkan 8 sektor prioritas yang dibagi ke dalam 2 jenis yaitu sektor yang sudah ada (perikanan tangkap dan akuakultur, manufaktur berbasis kelautan, perdagangan, transportasi dan logistik, serta pariwisata), dan sektor yang sedang berkembang (energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, serta konservasi laut dan jasa ekosistem).

### 2.1.3 Ekonomi Biru pada RPJMN 2025-2029

Agenda pembangunan RPJMN 2025 yang berkaitan dengan ekonomi biru berada pada Prioritas Nasional Nomor 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Dalam mendukung proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dituangkan ke dalam

Sasaran 5 yaitu terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan melalui (a) ekonomi syariah; (b) ekonomi digital; serta (c) pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.

Selain Prioritas Nasional (PN) 2, substansi ekonomi biru juga termuat dalam:

1. PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Sasaran 3: Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, arah kebijakan: Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi

Relevansi terhadap ekonomi biru adalah UMKM dan Koperasi di wilayah pesisir, kelautan dan perikanan

Sasaran 4: Meningkatnya nilai tambah pariwisata, arah kebijakan: pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan  
Relevansi terhadap ekonomi biru adalah berkenaan dengan pariwisata bahari

2. PN04 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta penguatan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

Sasaran 1: Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata, arah kebijakan: Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan Science, Technology, Engineering, Art and Mathematic (STEAM)

Relevansi terhadap ekonomi biru adalah penguatan pendidikan yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan serta pengembangan di n Science, Technology, Engineering, Art and Mathematic (STEAM) di bidang kelautan dan perikanan

Sasaran 4: Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan: peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; penguatan pendidikan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan manajemen talenta nasional

Relevansi terhadap ekonomi biru adalah penguatan pendidikan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan manajemen talenta nasional dibidang kelautan dan perikanan

3. PN 05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sasaran 1: Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dna daya saing industri pengolahan, arah kebijakan: percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi dan berorientasi ekspor

Relevansi terhadap ekonomi biru adalah hilirisasi industri berbasis SDA unggulan di bidang kelautan dan perikanan

4. PN 06 – Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Sasaran 3: mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arah kebijakan: peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

Relevansi terhadap ekonomi biru adalah mewujudkan kemandirian desa dengan menerapkan program ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru

5. PN 07 – Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

Sasaran 2: Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani

Arah kebijakan: Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan

Relevansinya adalah Transformasi tata kelola ekonomi biru

6. PN 08 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sasaran 2: Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju

Arah kebijakan: pelestarian pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa

Relevansinya terhadap ekonomi biru adalah pelestarian pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang mendukung program ekonomi biru.

## 2.2

### Intervensi Kebijakan Ekonomi Biru

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2, dilakukan serangkaian intervensi ekonomi biru dilakukan sebagai berikut:

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk

meningkatkan peran strategis ekonomi biru dalam transformasi pembangunan secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor akuakultur dan perikanan tangkap;

penguatan industri manufaktur berbasis sumber daya laut dan perairan yang berfokus pada pengembangan produk pangan, energi, dan farmasi yang bernilai tambah dan berteknologi tinggi; penguatan industri transportasi dan logistik maritim utamanya industri pelayaran, pelabuhan, dan perkapalan; serta pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang didukung penerapan standar, SDM, investasi, dan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat; sekaligus mempromosikan sektor-sektor baru yang mencakup inovasi energi laut terbarukan, pengembangan bioteknologi, bioprospecting dan bioekonomi kelautan, penguatan riset dan pendidikan melalui kerja sama industri, universitas, dan lembaga riset, serta pengelolaan konservasi dan jasa ekosistem laut. Upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi biru tersebut didukung oleh tata kelola yang lebih baik, meliputi kebijakan yang terintegrasi, regulasi yang tepat, kelembagaan yang kompeten, infrastruktur yang berkualitas, pembiayaan yang berkelanjutan, serta pengelolaan kesehatan ekosistem laut, penerapan nature-based solution dan ocean accounting, serta pengaturan tata ruang laut dan zonasi pesisir yang harmonis.

Serangkaian intervensi kebijakan Ekonomi Biru pada Prioritas Nasional 2 dijabarkan sebagai berikut.

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan melalui:

- a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap dan akuakultur, pengelolaan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (ecofishing port), pengembangan kluster komoditas unggulan akuakultur, termasuk ikan hias, Tuna Cakalang Tongkol, dan budidaya lobster, tilapia, dan udang;

- b. Penguatan industri manufaktur berbasis sumber daya laut dan perairan yang berfokus pada pengembangan produk pangan, energi, dan farmasi yang bernilai tambah dan berteknologi tinggi;
- c. Penguatan industri transportasi dan logistik maritim utamanya industri pelayaran, pelabuhan, dan perkapalan; serta
- d. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang didukung penerapan standar, sumber daya manusia, investasi, dan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat; sekaligus
- e. Mempromosikan sektor-sektor baru yang mencakup inovasi energi laut terbarukan, pengembangan bioteknologi, bioprospecting dan bioekonomi kelautan;
- f. Pengelolaan konservasi dan jasa ekosistem.

Upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi biru tersebut membutuhkan tata kelola yang lebih baik meliputi: kebijakan yang terintegrasi, regulasi yang kondusif, kelembagaan yang kompeten, infrastruktur yang berkualitas, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, akan terus dilakukan pengelolaan kesehatan ekosistem pesisir dan laut (ocean health), neraca sumber daya laut (ocean accounting), penerapan marine nature based solution, inventarisasi potensi sumber daya kelautan, pengaturan tata ruang laut dan zonasi pesisir yang harmonis, penangkapan ikan terukur, dan peningkatan efektivitas pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan.

## 2.3

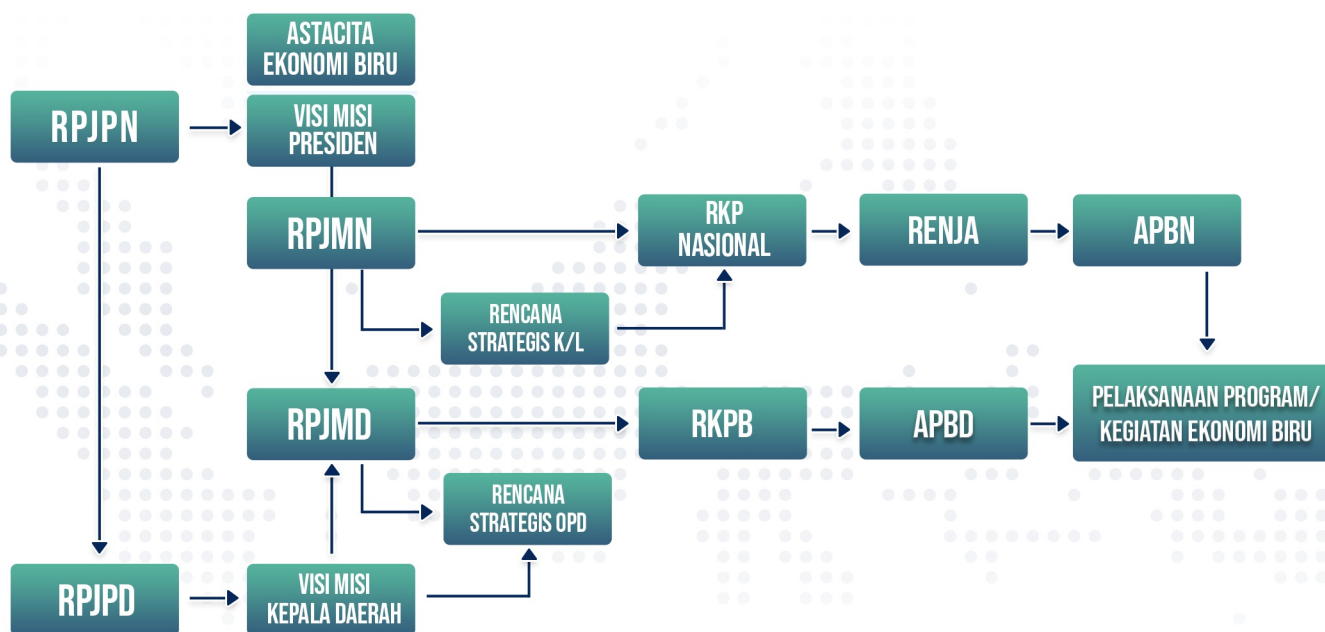
### Integrasi Ekonomi Biru dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Ekonomi biru menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahapan Pembangunan nasional jangka Panjang RPJPN 2025-2045 Ekonomi Biru

merupakan landasan transformasi ekonomi yang akan menjadi acuan bagi daerah dalam merumuskan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) baik di skala Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, di tingkat nasional, RPJMN 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD).

Gambaran umum integrasi ekonomi biru ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Integrasi Ekonomi Biru dalam dokumen perencanaan pembangunan RPJMN 2025-2029

RPJMN tahun 2025 - 2029 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025 - 2045. Ekonomi biru kemudian dijabarkan ke dalam level perencanaan strategis lima tahunan, di level nasional dilakukan pada level Kementerian/Lembaga dan di daerah pada level Rencana Strategis OPD. Pada implementasi ekonomi biru tiap tahun maka pengarusutamaan pencapaian ekonomi biru dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya kemudian diturunkan dalam Renja dan selanjutnya dimuat dalam APBN di level Pusat, sedangkan di level daerah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja OPD dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya dijabarkan dalam APBD, untuk selanjutnya, pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui DIPA dan DIPA Daerah. Dalam mendukung proses perencanaan berjenjang, diperlukan penyalarsan program prioritas nasional dan daerah biasanya difasilitasi dalam forum rapat koordinasi teknis (rakortek).

Forum koordinasi teknis antara kementerian/lembaga di tingkat pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) bertujuan untuk menyusun dan menyelaraskan program serta anggaran pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dalam hal ini program prioritas yang berkaitan dengan Ekonomi Biru. Rakortek biasanya dilaksanakan oleh Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tahun sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Setiap kementerian teknis melakukan Rakortek dengan dinas terkait di daerah guna memastikan sinergi antara pusat dan daerah. Selain itu, terdapat pula forum rapat koordinasi gubernur (Rakogub). Rakogub merupakan koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dengan seluruh gubernur di Indonesia guna membahas kebijakan strategis nasional yang membutuhkan peran aktif pemerintah provinsi. Forum ini dapat dimanfaatkan untuk mengkoordinasikan program - program ekonomi biru termasuk forum Musrenbangnas. Dimana pada musrenbangnas ini akan menghasilkan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBN.

An underwater scene featuring a large grey shark swimming towards the viewer, surrounded by numerous smaller fish with dark vertical stripes on a lighter body. The water is clear and blue. A glowing green circular light effect is centered around the text box.

Bab  
3

**PENANDAAN  
ANGGARAN  
EKONOMI BIRU**

### 3.1

## Tujuan Penandaan Anggaran Ekonomi Biru

Penandaan anggaran ekonomi biru bertujuan untuk:

- A. Memastikan intervensi yang mendukung upaya pencapaian target dan indikator ekonomi biru sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Peta Jalan diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan, dan
- B. Memastikan intervensi pencapaian ekonomi biru mendapatkan pemantauan dan evaluasi yang sistematis untuk menilai kinerja pelaksanaan Ekonomi Biru setiap tahunnya.

### 3.2

## Klaster dan Sub Klaster *Dynamic Tagging* Ekonomi Biru

Satu rincian output bisa dilakukan penandaan untuk 1 program ekonomi biru yang relevan (lihat Gambar 4), selanjutnya rincian output dapat ditandai untuk mendukung lebih dari 1 indikator dalam ekonomi biru. Kategorisasi klaster ekonomi biru terdiri dari 8 klaster. Masing – masing klaster memiliki ruang lingkup dan cakupan berbeda yang merupakan ciri dari klaster ekonomi biru tersebut. Sebagai contoh, klaster 1 adalah perikanan tangkap dan akuakultur terdiri dari (i) perikanan tangkap, (ii) perikanan budidaya, (iii) keamanan dan mutu pangan akuatik.

Tabel 2. Kategorisasi klaster dan sub klaster Ekonomi Biru pada Penandaan Anggaran di KRISNA

No.	Klaster	Sub Klaster	Indikasi Kementerian/Lembaga
1.	<b>Perikanan Tangkap dan Akuakultur</b>	A. Perikanan Tangkap B. Perikanan Budidaya C. Keamanan dan Mutu Pangan Akuatik D. Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 3. Badan Pangan Nasional 4. Badan Karantina Indonesia 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Usulan) 8. Kementerian Dalam Negeri (Usulan) 9. K/L lainnya yang terkait
2.	<b>Manufaktur Berbasis Kelautan</b>	A. Industri Pengolahan Komoditas Perikanan dan Kelautan B. Industri Galangan Kapal C. Industri Kimia dan Farmasi D. Industri Garam E. Konstruksi Kelautan F. Jasa Manufaktur Berbasis Kelautan	1. Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Badan Pangan Nasional 4. Badan Karantina Indonesia (usulan) 5. Badan Standarisasi Nasional (usulan) 6. Kementerian BUMN (usulan) 7. K/L lainnya yang terkait

3.	<b>Perdagangan, transportasi, dan logistik maritim</b>	A. Perdagangan B. Transportasi dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>2. Kementerian Koordinator Bidang Pangan</li> <li>3. Badan Pangan Nasional</li> <li>4. Badan Karantina Indonesia</li> <li>5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>6. Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Usulan)</li> <li>8. Kementerian Dalam Negeri (Usulan)</li> <li>9. K/L lainnya yang terkait</li> </ol>
4.	<b>Pariwisata</b>	A. Pariwisata Bahari dan Danau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pariwisata</li> <li>2. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif</li> <li>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>4. Badan Karantina Indonesia (usulan)</li> <li>5. Kementerian BUMN (usulan)</li> <li>6. K/L lainnya yang terkait</li> </ol>
5.	<b>Bioteknologi dan Bioekonomi</b>	A. Bioteknologi dan Bioekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li> <li>2. Kementerian Kehutanan</li> <li>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>4. Badan Karantina Indonesia (usulan)</li> <li>5. Kementerian Tinggi, Sains, dan Teknologi (usulan)</li> <li>6. K/L lainnya yang terkait</li> </ol>
6.	<b>Energi Terbarukan</b>	A. Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>2. K/L lainnya yang terkait</li> </ol>
7.	<b>Penelitian dan Pendidikan</b>	A. Penelitian B. Pendidikan dan Pelatihan C. Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>3. Kementerian Perindustrian</li> <li>4. Kementerian Tinggi, Sains, dan Teknologi (usulan)</li> <li>5. Kementerian Kebudayaan (usulan)</li> <li>6. Kementerian Dalam Negeri (Usulan)</li> <li>7. K/L lainnya yang terkait</li> </ol>
8.	<b>Konservasi Laut, Rehabilitasi, dan Jasa Ekosistem</b>	A. Konservasi Laut dan Perairan B. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut C. Jasa Ekosistem D. Penataan Ruang Laut E. Penanganan Sampah Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li> <li>3. Kementerian Kehutanan</li> <li>4. Kementerian Pekerjaan Umum</li> <li>5. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>7. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)</li> <li>8. K/L lainnya yang terkait</li> </ol>

K/L – K/L tersebut merupakan Kementerian/Lembaga yang teridentifikasi memiliki RO yang dapat ditagging Ekonomi Biru

Definisi dari masing-masing sektor-sub sektor dalam aplikasi KRISNA, dijabarkan sebagai berikut:

## KLASTER 1 - PERIKANAN TANGKAP DAN AKUAKULTUR

Difokuskan untuk mendorong penerapan pengelolaan kegiatan perikanan tangkap dan akuakultur yang berkelanjutan, mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, keamanan dan mutu pangan akuatik.

Output kegiatan yang relevan adalah:

- A. Perikanan tangkap berbasis kuota, pendekatan ekosistem, dan strategi penangkapan yang lebih baik;
- B. Praktik akuakultur menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk perbaikan regulasi zonasi akuakultur dan solusi teknologi yang berkelanjutan, standar dan skema sertifikasi yang kuat, serta menyediakan skema insentif untuk praktik-praktik yang berkelanjutan;
- C. Hilirisasi produk perikanan tangkap dan akuakultur yang didukung pengembangan rantai pasok yang berketahanan, termasuk penguatan sistem rantai dingin, pembinaan UPI, peningkatan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta sertifikasi;
- D. Skema perlindungan sosial bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan pekerja maritim lainnya, dan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan bagi pelaku skala kecil;
- E. Teknologi, inovasi, penelitian, data perikanan tangkap, akuakultur, serta mutu pangan akuatik; dan
- F. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk mengurangi IUUF.

## KLASTER 2 - INDUSTRI MANUFAKTUR BERBASIS KELAUTAN

Dalam ekonomi biru difokuskan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan, yang termasuk ke dalam klaster ini apabila salah satunya mencakup Industri pengolahan komoditas perikanan dan kelautan, Industri Galangan Kapal, Industri Kimia dan Farmasi, Industri Garam, Konstruksi Kelautan, Jasa manufaktur berbasis kelautan.

Output kegiatan yang relevan adalah:

- A. Penerapan teknologi dan inovasi untuk produktivitas dan diversifikasi pengolahan komoditas perikanan dan kelautan;
- B. Pengembangan industri pengolahan pangan;
- C. Pengembangan industri garam, industri kimia dan farmasi;
- D. Pengembangan industri kapal dan galangan kapal;
- E. Infrastruktur kelautan dan investasi maritim;
- F. Ekonomi sirkuler, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dan penanganan limbah industri pengolahan;
- G. Mendorong skema dan insentif keuangan yang kreatif untuk mendukung proyek-proyek manufaktur berbasis kelautan;
- H. Penyiapan kebijakan yang baik serta sinergi dalam implementasi kebijakan dan program yang melibatkan kolaborasi publik dan swasta.

## KLASTER 3 - PERDAGANGAN, TRANSPORTASI, DAN LOGISTIK MARITIM

Dalam ekonomi biru difokuskan dengan memperluas dan meningkatkan daya saing transportasi laut Indonesia yang terintegrasi dengan transportasi darat dan udara, pelabuhan dan logistik, perdagangan, dan jasa pendukung maritim lainnya.

Output kegiatan yang relevan adalah:

- A. Penyediaan, kualitas, dan integrasi infrastruktur maritim;
- B. Pengembangan sebagai hub global melalui penguatan jalur pelayaran serta pelabuhan
- C. Manajemen logistik termasuk distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
- D. Perdagangan antarpulau dan rantai pasok;
- E. Penghijauan transportasi, pelayaran, pelabuhan, dan layanan logistik.

## KLASTER 4 - BIOTEKNOLOGI DAN BIOEKONOMI

Di Indonesia masih berada pada tahap awal pengembangan bioteknologi dan bioekonomi sehingga diperlukan upaya pengembangan dan meningkatkan pemahaman tentang proses dan teknologi kelautan di Indonesia.

Output kegiatan yang relevan adalah:

1. Memperluas bioprospecting untuk memasok sumber daya hayati yang paling potensial untuk menciptakan nilai tambah;
2. Mengembangkan bioekonomi dengan kolaborasi yang lebih luas dengan lembaga-lembaga yang telah bergerak di bidang bioteknologi kelautan di negara lain;
3. Meningkatkan pengelolaan limbah di sektor bioteknologi dan bioekonomi, termasuk melalui pendekatan ekonomi sirkular.

## KLASTER 5 - PARIWISATA

Pariwisata berkelanjutan dalam ekonomi biru Indonesia

Output kegiatan yang relevan adalah:

1. Perumusan Kebijakan Pariwisata Bahari
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan
3. Penerapan Standar Industri Pariwisata
4. Sarpras, Fasilitas, dan Transportasi yang Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata
5. Investasi Pariwisata Berkelanjutan
6. Mengembangkan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan yang Didukung oleh Akses Masyarakat terhadap Wilayah Pesisir
7. Promosi Pariwisata Bahari dan Danau
8. Penguatan SDM Pariwisata
9. Ekonomi Sirkuler dalam Rantai Pasok Pariwisata

## KLASTER 6 - ENERGI TERBARUKAN

Energi terbarukan lepas pantai di masa depan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi di industri kelautan perikanan.

Output kegiatan yang relevan adalah:

1. Survey dan Pemetaan Potensi Energi Terbarukan
2. Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Berbasis Kelautan
3. Memperkuat Faktor-Faktor Pendukung untuk Pembangkitan Energi Terbarukan Berbasis Kelautan yang Layak, Termasuk Peraturan dan Kebijakan yang Relevan, Penelitian dan Pengembangan, serta Studi Kelayakan untuk Proyek
4. Memperluas Kolaborasi, Termasuk Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Investasi Energi Terbarukan Berbasis Kelautan

## KLASTER 7 - PENELITIAN DAN PENDIDIKAN

Penelitian dan pendidikan untuk pengembangan sektor ekonomi biru mencakup penelitian pendidikan yang mendukung perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, industri manufaktur kelautan, bioteknologi, bioekonomi, konservasi, restorasi dan jasa kelautan.

Output kegiatan yang relevan terkait pendidikan dan pelatihan adalah:

1. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perikanan, Kelautan, Energi, Transportasi dan Logistik, serta Industri Manufaktur Kelautan dan Perikanan
2. Penyuluhan kepada Masyarakat
3. Memperbaiki Sistem Pendidikan, Terutama yang Terkait dengan STEAM, Termasuk Kurikulum, Pengajar, dan Infrastruktur yang Didukung oleh Kerja Sama antara Institusi Pendidikan dan Industri
4. Mengembangkan, Memodifikasi, Alih Teknologi, dan Mengadopsi Teknologi melalui Kolaborasi Riset, Lisensi, *Reverse Engineering*, dan Pengadaan yang Didukung oleh Kolaborasi antara Pemangku Kepentingan Publik, Akademisi, Riset, dan Industri
5. Pengumpulan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
6. Survey dan Pemetaan Peta Tematik Kelautan

## KLASTER 8 - KONSERVASI LAUT, REHABILITASI, DAN JASA EKOSISTEM

Konservasi laut dan pengelolaan berkelanjutan dari pengembangan jasa ekosistem melingkupi lintas sektor.

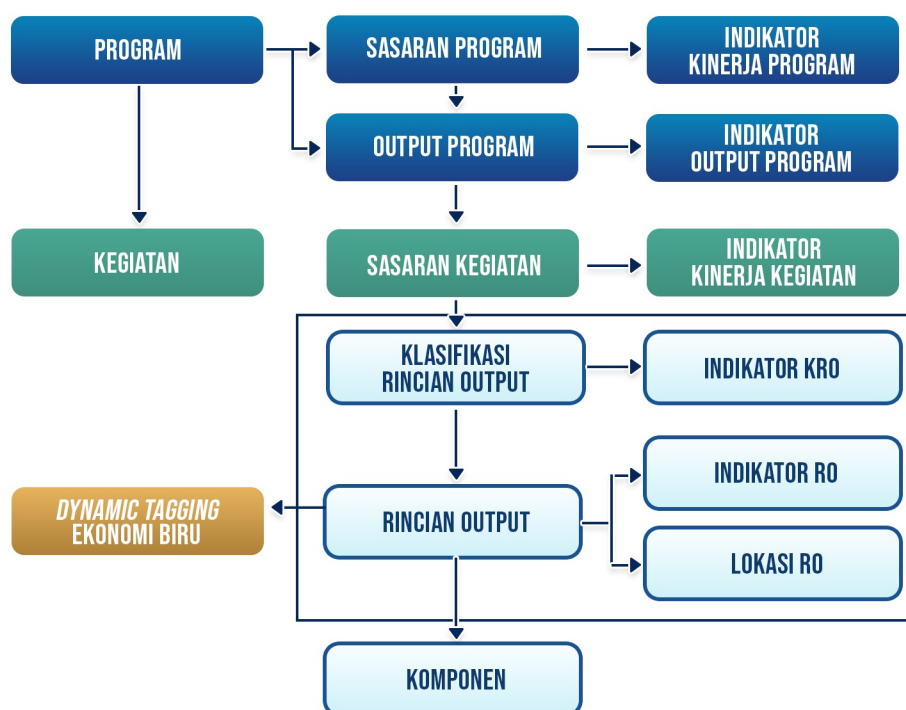
Output kegiatan yang relevan adalah:

1. Peningkatan Luas dan Efektivitas Kawasan Konservasi
2. Konservasi Biota Perairan yang Dilindungi dan Terancam Punah
3. Pengembangan Ekosistem Karbon Biru
4. Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove, Lamun, dan Terumbu Karang
5. Pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pantai dan Ekosistem Pesisir
6. Pengembangan Mekanisme Keuangan dan Pendanaan yang Inovatif untuk Mendukung Transisi Menuju Ekonomi Biru yang Berkelanjutan dan Pendekatan Berbasis Pasar Karbon Biru

7. Merancang Rencana Tata Ruang Laut dan Pesisir yang Efektif
8. Kebijakan dan Program yang Efektif Terkait dengan Penerapan Manajemen Pengendalian Sampah Laut untuk Menjaga Ekosistem Laut yang Sehat
9. Pengusahaan dan Pemanfaatan Jasa Ekosistem serta Pemanfaatan dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil secara Berkelanjutan
10. Pemantauan Kualitas Air Laut

### 3.3 Penandaan Anggaran Pada Level Rincian Output

Penandaan anggaran ekonomi biru dilakukan pada level rincian output karena tingkatan ini mempunyai informasi yang memadai untuk mengidentifikasi dan memantau intervensi/aktivitas yang dilakukan oleh unit atau satuan kerja (satker) kementerian/lembaga (K/L), beserta indikator capaiannya, besaran dana yang dialokasikan dan realisasinya. Hal ini akan memudahkan pelaksana penandaan anggaran untuk menelaah kesesuaian rincian Output kegiatan dengan upaya pencapaian target dan indikator ekonomi biru. Level rincian output yang ditandai berada di bawah kegiatan unit eselon II/direktorat Kementerian/Lembaga, sesuai dengan struktur data Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) pada aplikasi Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) sebagai berikut:

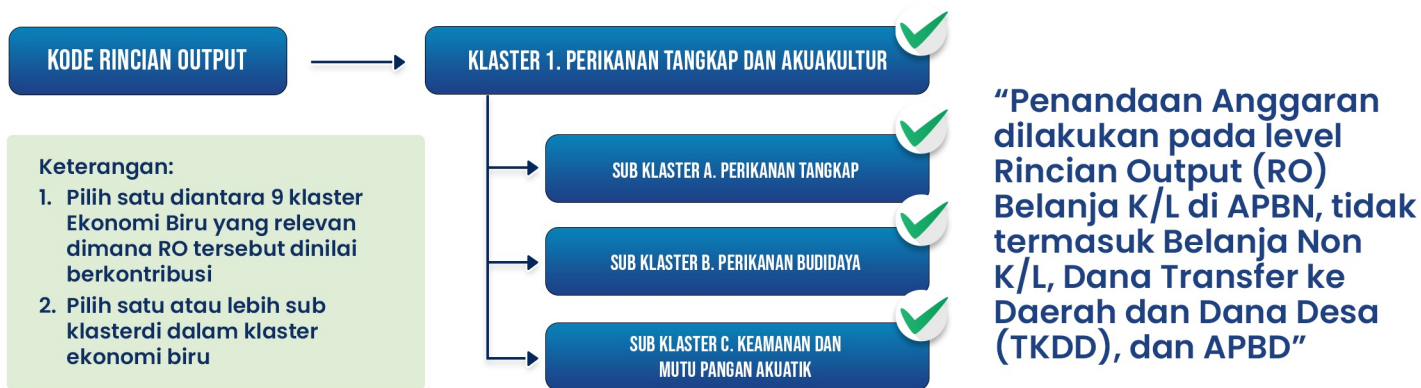


**Gambar 3.** Struktur data Renja K/L pada aplikasi Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)

Definisi sesuai Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 4/Juklak/Sesmen/04/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut:

2. 1. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program mencerminkan tugas dan fungsi K/L dan dapat digunakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja Eselon I.
2. Sasaran Program adalah hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional. Bagi Program yang digunakan bersifat lintas K/L atau lintas Unit Kerja Eselon I maka Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dapat dirumuskan berbeda sesuai tugas dan fungsi unit kerja yang dimaksud serta sesuai dengan kontribusinya dalam Program tersebut.
3. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif.
4. Output Program merupakan keluaran yang dihasilkan oleh K/L untuk mendukung terwujudnya outcome.
5. Indikator Output Program adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (Output) Program.
3. 6. Kegiatan adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran kegiatan. Kegiatan dapat bersifat Lintas Eselon I atau Lintas Eselon II dalam Eselon I yang sama.
4. 7. Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output.) Kegiatan.
8. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan.
9. Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah kumpulan atas keluaran (output.) K/L (Rincian Output. - RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output.) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
10. Rincian Output (RO) adalah keluaran (output.) riil atau produk akhir yang sangat spesifik dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
6. 11. Komponen adalah aktivitas berupa tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (Output.) Kegiatan.
12. Lokasi adalah lokasi dilaksanakannya rincian output dan/atau lokasi penerima manfaat rincian output.

Dalam sistem KRISNA, terdapat beberapa pilihan untuk melakukan penandaan anggaran untuk beberapa kategori, yaitu Prioritas Nasional, Nawa Cita, Janji Presiden, Tematik APBN, dan Ekonomi Biru dilakukan pada aplikasi KRISNA dengan memberikan tanda centang pada level rincian output dengan memilih salah satu tematik tagging kemudian memilih indikator yang relevan dengan intervensi/aktivitas pada rincian output tersebut.



**Gambar 4.** Ilustrasi penandaan Rincian Output yang mendukung Ekonomi Biru

## 3.4

### Waktu dan Proses Penandaan

Pelaksanaan penandaan anggaran Ekonomi Birupada aplikasi Renja K/L (KRISNA) dan RKA K/L mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran tahunan, dengan alur sebagai berikut:

1. Proses penandaan Ekonomi Biru dimulai pada tahun perencanaan (t-1) dengan identifikasi rincian output yang relevan dalam mendukung pencapaian target dan indikator ekonomi biru berdasarkan tagging dynamic yang dilakukan oleh Direktorat Mitra K/L dan hasil evaluasi terhadap penandaan anggaran sebelumnya pada bulan Januari-Februari.
2. Hasil identifikasi rincian output selanjutnya akan dibahas pada pertemuan sosialisasi penandaan anggaran ekonomi biru dan konfirmasi rincian output K/L yang akan dilaksanakan pada kuartal 2.
  - a. Pertemuan bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengonfirmasi rincian output baik yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian target dan indikator setiap Tujuan Ekonomi Biru.
  - b. Proses pertemuan:
    - i. arah kebijakan pencapaian ekonomi Biru yang selaras dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan kebijakan penandaan anggaran ekonomi biru (Direktorat Kelautan Perikanan - Kementerian PPN/Bappenas)
    - ii. tata cara penandaan dalam aplikasi KRISNA (melibatkan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas;
    - iii. pemantauan dan evaluasi rincian output yang telah dilakukan penandaan ekonomi biru dalam e-monev Bappenas (melibatkan Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan)
    - iv. penyampaian data identifikasi rincian output terkait ekonomi biru oleh mitra K/L di Bappenas/Biro perencanaan dan/atau unit teknis K/L.
3. Penandaan anggaran t-1 dilakukan oleh Direktorat sektor mitra K/L di Bappenas pada aplikasi Renja KL (KRISNA) sesuai hasil identifikasi rincian output K/L yang telah dibahas pada pertemuan konfirmasi atau Trilateral Meeting Renja K/L.
4. Rincian output yang telah dilakukan penandaan anggaran ekonomi biru divalidasi/ditelaah kesesuaiannya oleh Direktorat Sektor di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan jadwal penelaahan Renja KL.

Selanjutnya, baik Direktorat Kelautan Perikanan dan Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas berencana melakukan konsolidasi laporan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala minimal setahun sekali yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan rincian output yang mendukung Ekonomi Biru didasarkan atas data realisasi capaian rincian output dan pelaksanaan anggaran. Pada tahap awal ini proses penginputan penandaan anggaran akan dilakukan oleh Direktorat mitra K/L di Bappenas

## 3.5

### Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Penandaan Anggaran Ekonomi Biru

Pembagian peran dan tanggung jawab di antara KL, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemenkeu pada proses penandaan anggaran Ekonomi Biru diuraikan pada tabel 2 di bawah ini:

K/L	Unit	Peran/Tanggung Jawab
<b>Kementerian PPN/Bappenas</b>	Direktorat Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengkoordinasikan keseluruhan proses penandaan rincian <i>output</i>K/L yang mendukung Ekonomi Biru</li></ul>

	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sistem dan data terkait penandaan anggaran Ekonomi Birupada aplikasi KRISNA</li> <li>• Mengkoordinasikan teknis penandaan anggaran pada aplikasi KRISNA.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan sistem <i>dynamic tagging</i> pada aplikasi KRISNA</li> </ul>
	Direktorat sektor Bappenas terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penandaan anggaran ekonomi biru</li> <li>• Memastikan kesesuaian substansi dan mengkoordinasikan penandaan anggaran Ekonomi Biru oleh mitra K/L</li> <li>• Melakukan penelaahan dan persetujuan penandaan anggaran dari mitra K/L pada aplikasi KRISNA</li> <li>• Melakukan validasi pemantauan dan evaluasi kinerja program mitra K/L yang terkait Ekonomi Biru</li> </ul>
<b>Kementerian/Lembaga</b>	Biro Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi rincian <i>output</i> 3ang relevan untuk <i>dynamic tagging</i> ekonomi biru</li> </ul>

## 3.6

### Identifikasi Rincian Output yang Mendukung Ekonomi Biru

Identifikasi rincian Output kegiatan terkait Ekonomi Biru dilakukan dengan menilai apakah rincian output kegiatan tersebut berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung pada upaya pencapaian target dan indikator Ekonomi Biru yang relevan.

Saat ini Identifikasi rincian output kegiatan Ekonomi Biru dilakukan melalui proses identifikasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, dengan mempertimbangkan hal berikut ini:

- Identifikasi rincian output kegiatan dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan pengetahuan teknis dan pemahaman direktorat sektor di Kementerian PPN/Bappenas.
- Hasil identifikasi tersebut akan dikoordinasikan dan disepakati dengan K/L
- Selanjutnya, daftar identifikasi rincian output K/L yang ada pada RKP dapat dijadikan acuan bagi K/L berkaitan dengan penandaan anggaran Ekonomi Biru.
- Daftar rincian output K/L dapat berkembang sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan
- Selanjutnya rincian output dapat ditelusuri, dimonitor perkembangan pelaksanaan dan realisasinya minimal setahun sekali
- Kegiatan tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan referensi data dari Renja K/L (KRISNA). Kode rincian output di KRISNA merupakan referensi bagi kode yang ada di e-monev (Bappenas).



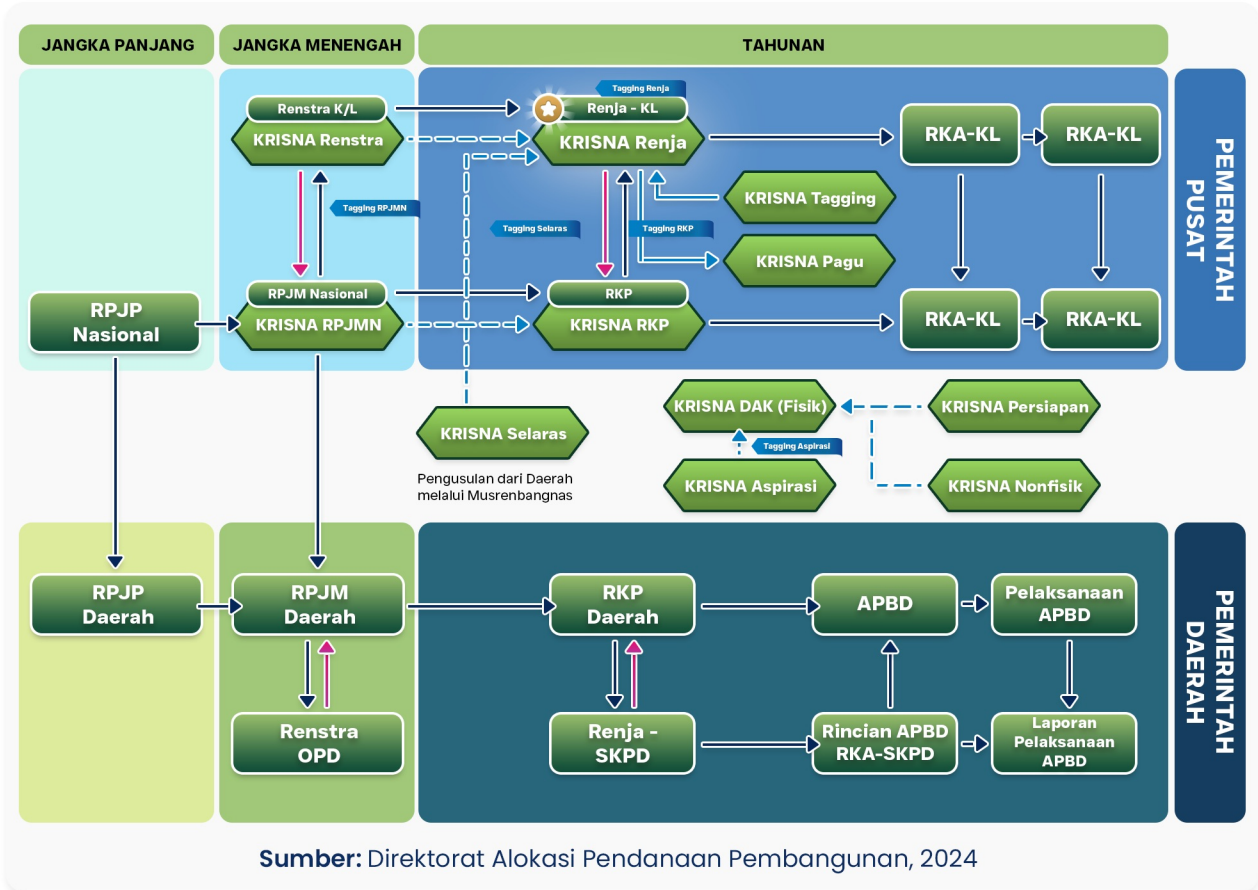
Bab  
4

**PENANDAAN  
ANGGARAN DI  
SISTEM KRISNA**

# 4.1

## KRISNA Renja Tagging

KRISNA merupakan aplikasi umum bidang perencanaan yang digunakan untuk mendukung proses penyusunan dokumen – dokumen perencanaan. KRISNA Renja merupakan 1 dari 11 Subsistem pada sistem KRISNA yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan di tingkat pusat dalam hal ini Belanja K/L



Gambar 5. Penandaan anggaran di sistem krisna

### Jenis – Jenis Tagging Renja K/L

Merujuk pada gambar diatas, tagging renja dapat dilakukan di beberapa level, dalam hal ini teridentifikasi menjadi jenis – jenis tagging renja K/L, sebagai berikut:

- 1.** RPJMN Tagging, Jika penandaan dilakukan pada level KRISNA renja untuk tagging RPJMN
- 2.** RKP Tagging, Apabila penandaan dilakukan terhadap Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, proyek Prioritas
- 3.** Tematik APBN Tagging, Apabila penandaan dilakukan berkaitan dengan isu tematik APBN (yaitu tematik Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Anggaran Infrastruktur, Anggaran Responsif Gender, KSST, Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, Penanganan Stunting)
- 4.** Selaras Tagging, Apabila penandaan dilakukan pada level Lokasi di Rincian Output, hal ini dilakukan untuk memantau proyek-proyek K/L yang terkait dengan usulan Daerah
- 5.** Dynamic Tagging, Apabila penandaan dilakukan berdasar isu



The image features a hand holding a silver pen over a document. A prominent green rounded square overlay is centered on the page, containing the text 'Bab 5' in white. The background is a blurred office setting with a computer monitor and various digital overlays, including dollar signs and code snippets, suggesting a financial or IT context.

# Bab 5

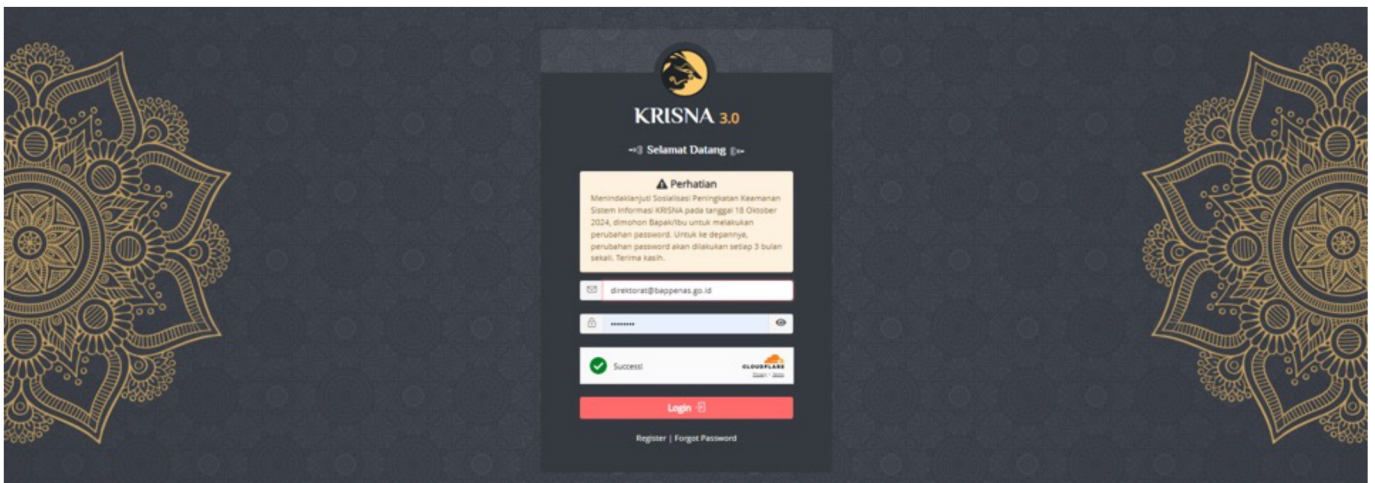
**TATA CARA PENANDAAN ANGGARAN  
PADA PENYUSUNAN RENJA K/L DALAM  
SISTEM INFORMASI KRISNA RENJA K/L**

Sebelum dilakukan penandaan anggaran di sistem informasi KRISNA, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi penginput data adalah:

- Sarana dan Prasarana *Personal Computer (PC)*, Laptop, atau *Smartphone* yang terhubung dengan internet
- Akses, Username dan password untuk dapat mengakses sistem informasi KRISNA

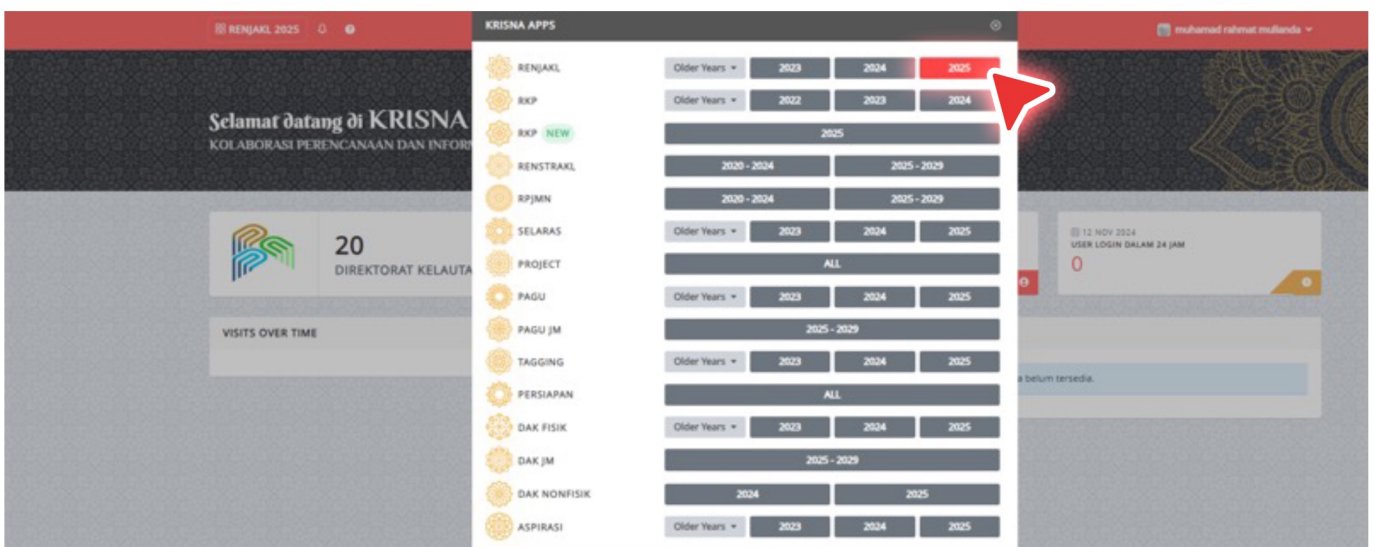
Selanjutnya, tata cara Penandaan Anggaran pada Penyusunan Renja K/L dalam Sistem Informasi KRISNA Renja K/L dilakukan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Dokumen Pendukung. Dokumen pendukung yang diperlukan pada saat proses input atau penelaahan dalam sistem informasi KRISNA (informasi RO, target volume, alokasi, serta ToR dan RAB sesuai hasil kesepakatan trilateral *meeting* penyusunan Renja dan RKA K/L).
2. Pemahaman Proses. Pemahaman terhadap seluruh regulasi dan aturan dalam melakukan proses input atau penelaahan dalam sistem informasi KRISNA.
3. Lakukan *Log in* pada sistem KRISNA dengan mengisikan *username* dan *password*



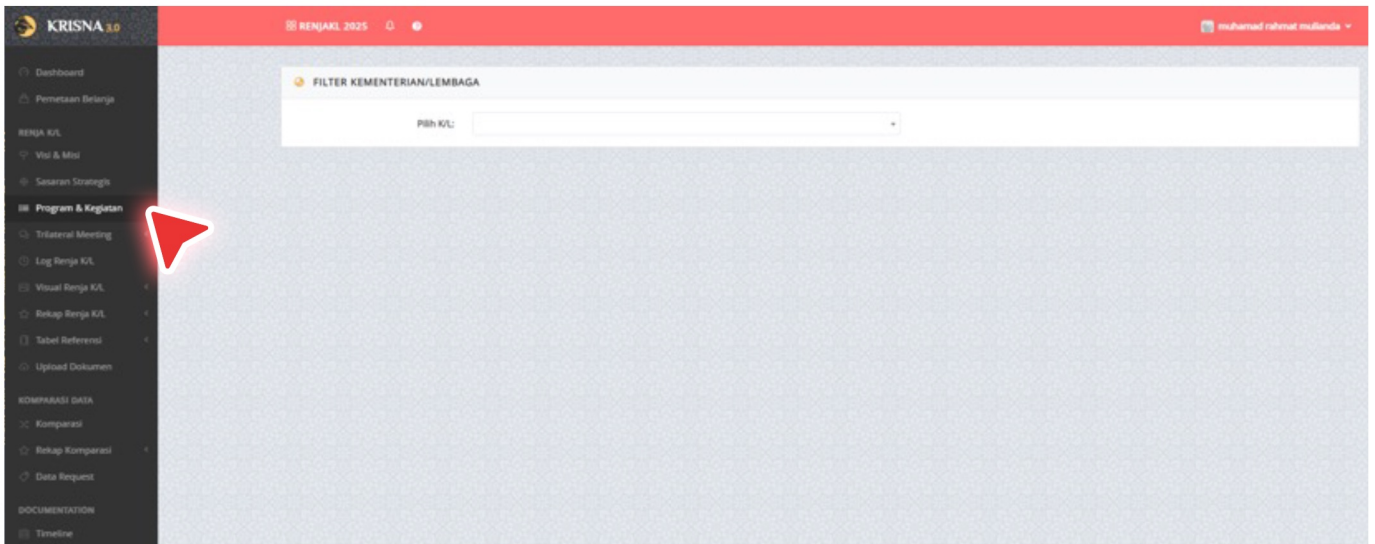
**Gambar 7.** Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (1). Halaman *log in* pada system KRISNA

4. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan laman untuk penyusunan Renja K/L. Perhatikan Tahun Anggaran Renja K/L.



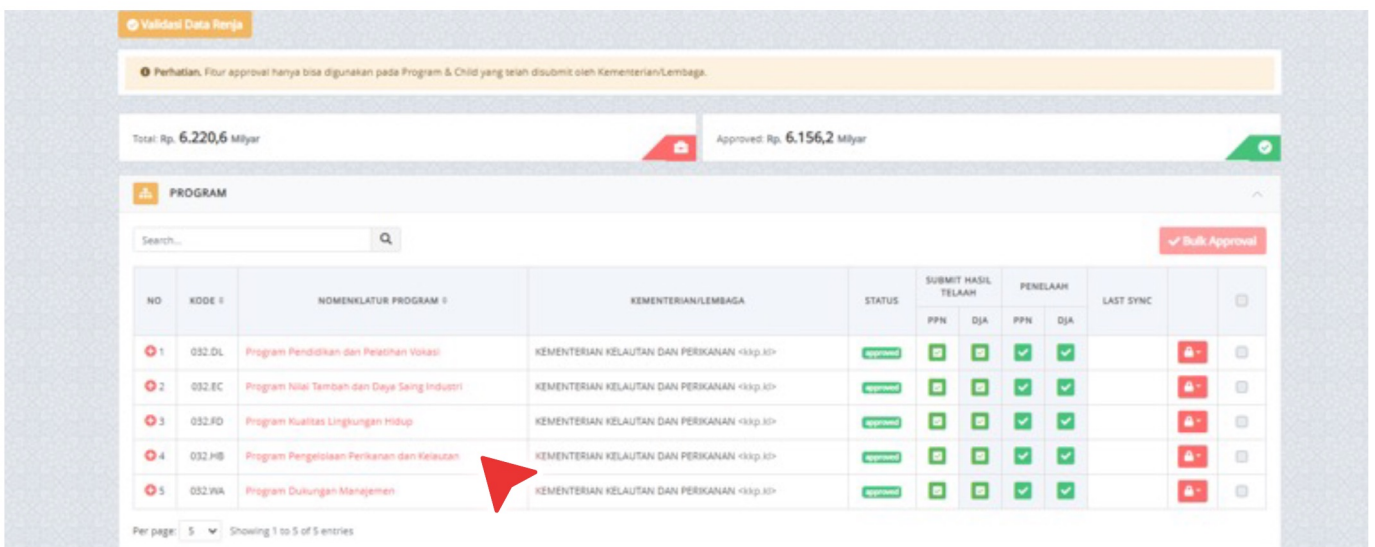
**Gambar 8.** Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (2). Tahun Anggaran RENJAKL

5. Pilih menu Program dan kegiatan pada dashboard.



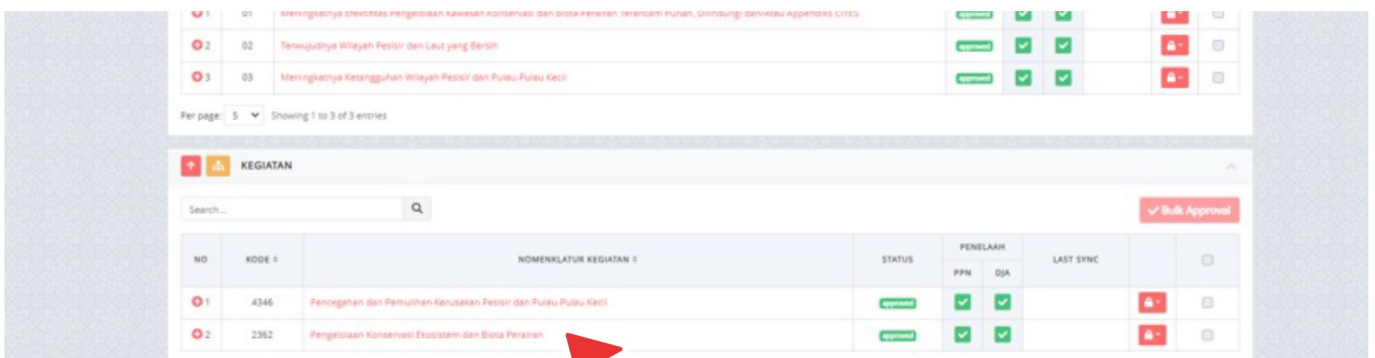
**Gambar 9.** Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (3). Menu Program dan Kegiatan

6. Daftar program K/L akan muncul secara berurutan sesuai dengan kode program. Pilih salah satu program K/L.



**Gambar 10.** Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (4). Contoh urutan daftar program K/L

7. Daftar kegiatan K/L akan muncul secara berurutan sesuai dengan kode kegiatan. Pilih salah satu kegiatan K/L.



**Gambar 11.** Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (5). Contoh urutan daftar kegiatan dan kode kegiatan K/L

8. Daftar Klasifikasi Rincian Output(KRO) akan muncul. Pilih salah satu KRO.

NO	KODE	NOMENKLATUR SASARAN KEGIATAN	STATUS	PENELAHAH		LAST SYNC
				PPN	DJA	
1	01	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Approved	✓	✓	

NO	KODE	NOMENKLATUR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	ALOKASI 2025	STATUS	PENELAHAH		LAST SYNC
					PPN	DJA	
1	2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemanjir dan Kelautan	6.013.800,0	Approved	✓	✓	
2	2362.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	849.188,0	Approved	✓	✓	
3	2362.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	284.724.000,0	Approved	✓	✓	
4	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies	11.168.152,0	Approved	✓	✓	
5	2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.395.400,0	Approved	✓	✓	

Gambar 12. Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (6). Contoh pemilihan KRO

9. Daftar Rincian Output(RO) akan muncul secara berurutan sesuai dengan kode RO. Klik gambar berbentuk gear dan pilih menu ubah.

Program & Kegiatan 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

At Program > Kegiatan > Klasifikasi Rincian Output > RINCIAN OUTPUT

Validasi Data Renja

Perhatian, Four approval hanya bisa digunakan pada Program & Child yang telah disubmit oleh Kementerian/Lembaga.

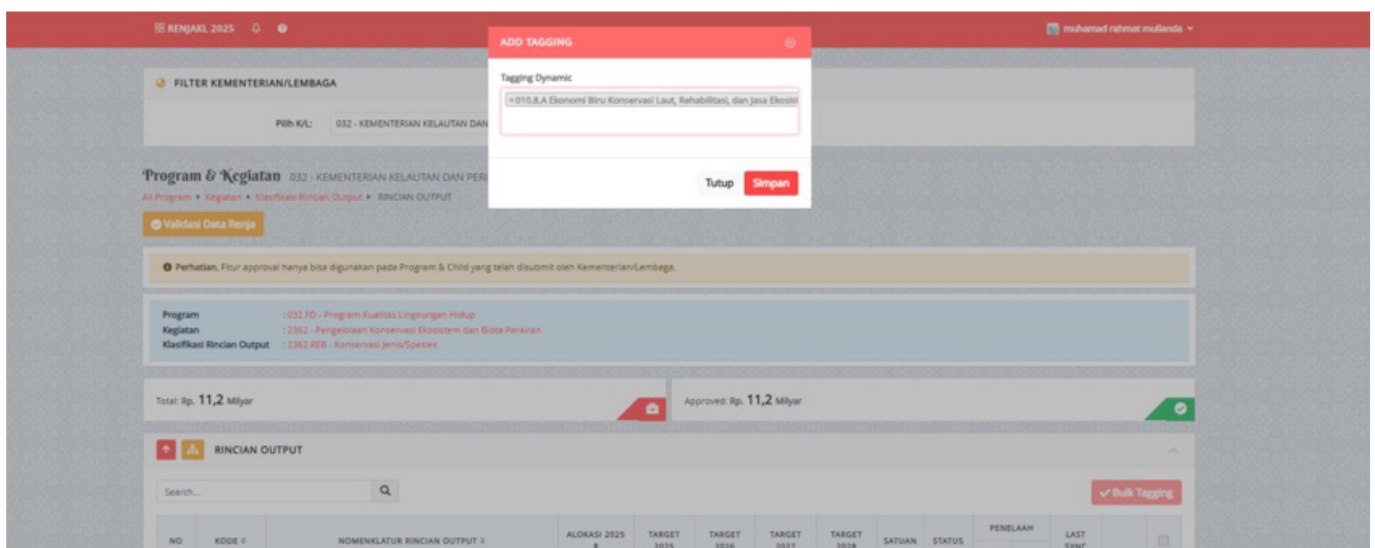
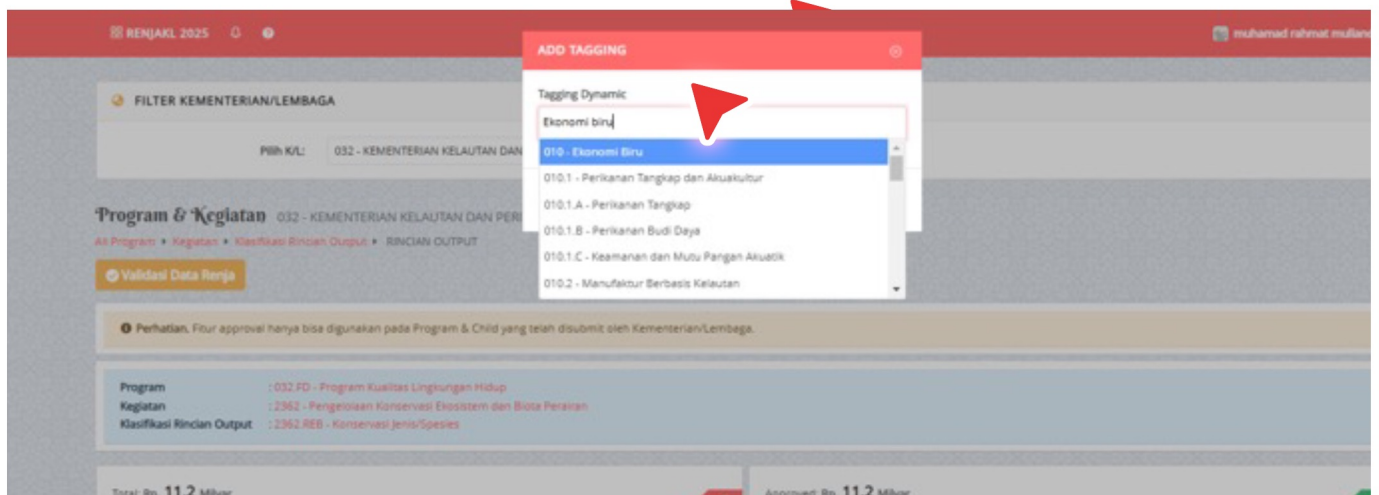
Program : 032.FD - Program Kualitas Lingkungan Hidup  
 Kegiatan : 2362 - Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan  
 Klasifikasi Rincian Output : 2362.REB - Konservasi Jenis/Spesies

Total Rp. 11,2 Milyar Approved Rp. 11,2 Milyar

NO	KODE	NOMENKLATUR RINCIAN OUTPUT	ALOKASI 2025	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	SATUAN	STATUS	PENELAHAH		LAST SYNC	Action
										PPN	DJA		
1	2362.REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks Cites (kumulatif)	11.168.152,0	25,0	25,0	25,0	25,0	Jenis	Approved	✓	✓		⚙️

Gambar 13. Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (7). Daftar Daftar Rincian Output (RO) dan kode RO

10. List tagging akan muncul. Silahkan cari tagging “EKONOMI BIRU”, pilih/klik salah satu Tujuan (goal) atau sub tujuan yang didukung oleh RO tersebut, kemudian klik indikator (bisa lebih dari satu) yang didukung oleh RO tersebut.



**Gambar 14.** Proses Penandaan Anggaran dalam Aplikasi KRISNA (8). Pemilihan Tagging Dynamic Ekonomi Biru

11. Setelah seluruh pengisian selesai, jangan lupa klik “**simpan**”. Data akan tersimpan sesuai hasil input.

An underwater scene featuring a large, branching coral structure on the left and a sea turtle swimming on the right. The water is clear blue. A green glowing ring is positioned around the central text box.

Bab  
6

PENUTUP

# BAB 6

## PENUTUP

Penandaan anggaran Ekonomi Biru merupakan upaya untuk memastikan intervensi yang mendukung pencapaian target dan indikator Ekonomi Biru yang telah dituangkan di dalam RKP dan Renja KL setiap tahunnya serta memonitor Prioritas Nasional 2, 3, 5 dan 8 terkait dengan Ekonomi Biru dalam perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penandaan anggaran Ekonomi Biru juga akan memudahkan identifikasi rincian output serta besaran alokasi anggaran untuk setiap intervensi kementerian/lembaga (K/L) yang ditujukan untuk pencapaian target dan indikator Ekonomi Biru. Setiap 6 bulan sekali data realisasi Ekonomi Biru akan dianalisis.

Kontribusi dan peran aktif K/L sangat penting dalam mengidentifikasi serta mengkonfirmasi rincian output terkait pencapaian Ekonomi Biru pada aplikasi KRISNA. Demikian juga dengan peran aktif Direktorat Sektor di Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan ketepatan rincian *output*.

Pedoman ini diharapkan dapat membantu proses penandaan anggaran Ekonomi Biru. Hasil dari proses penandaan selanjutnya akan digunakan sebagai basis dalam pemantauan dan evaluasi untuk menilai kinerja tahunan dari program/kegiatan pemerintah pusat dalam pencapaian target dan indikator Ekonomi Biru.

## Lampiran 1

### Identifikasi Awal Rincian *Output Dynamic Tagging* Ekonomi Biru

Definisi dari masing-masing sektor-sub sektor dalam aplikasi KRISNA, dijabarkan sebagai berikut:

Klaster 1. Perikanan Tangkap dan Akuakultur, yang termasuk ke dalam klaster ini apabila salah satunya mencakup:

- A. Perikanan Tangkap
- B. Perikanan Budidaya
- C. Keamanan dan Mutu Pangan Akuatik

#### A. Perikanan Tangkap

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat output sebagai berikut:

1. Penyiapan regulasi perikanan tangkap
2. Penyiapan Data dan Informasi
3. Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha
4. Awak kapal perikanan yang disertifikasi
5. Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya
6. Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan
7. Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan
8. Kelompok Usaha Bersama yang meningkatkan kapasitas kelembagaannya
9. Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan
10. Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran
11. Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi
12. Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional
13. Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar
14. Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan petani Sasaran
15. Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan
16. Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan
17. Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi
18. UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha
19. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan
20. Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya
21. Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur
22. Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan
23. Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan
24. Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya
25. Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan
26. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I
27. Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer di atas kapal perikanan
28. Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan
29. Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaannya - *Ocean for Prosperity Project* (Lautra)
30. Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - *Eco Fishing Port*
31. Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - *Ocean for Prosperity Project* (Lautra)
32. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II
33. Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
34. PBT Non Sistematis
35. Sertifikasi Nelayan dan Pembudidaya



## B. Perikanan Budidaya

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat output sebagai berikut:

1. Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat
2. Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi
3. Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi
4. Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi
5. Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut
6. Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau
7. Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar
8. Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut
9. Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat
10. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi
11. Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi
12. Pakan Ikan Air Tawar yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)
13. Toward Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia
14. Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi
15. Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)
16. Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)
17. Benih Kepiting yang diproduksi
18. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)
19. Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi
20. Benih Ikan Laut yang diproduksi
21. Benih Udang yang Diproduksi
22. Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat
23. Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat
24. Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat
25. Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat
26. Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat
27. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat
28. Benih Ikan Udang yang disalurkan ke masyarakat
29. Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat

## C. Keamanan dan Mutu Pangan Akuatik

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat *output* sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman
2. Gudang Beku dan Kelengkapannya
3. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
4. Industri Pengolahan Produk KP yang dibina
5. Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan
6. Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha
7. Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
8. Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah
9. Prasarana Pengujian Mutu
10. Promosi Usaha dan Investasi KP
11. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
12. Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas
13. Sarana Pengujian Mutu
14. Sarana Penyimpanan Produk KP
15. Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
16. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional
17. UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis
18. UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan
19. Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu
20. Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya
21. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi
22. Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan
23. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium
24. Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya
25. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
26. Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina
27. Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
28. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan
29. Kebijakan Standar Karantina Ikan
30. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Ikan
31. Pemantauan status, situasi dan peta sebaran hama dan penyakit ikan karantina di kawasan sentra produksi pangan (*blue food*)
32. Pemantauan/pengawasan/pengendalian pakan ikan dari kawasan sentra produksi pangan (*blue food*) dari kemungkinan ketidaksesuaian
33. Pemantauan/pengawasan/pengendalian pangan dari kawasan sentra produksi pangan (*blue food*) dari kemungkinan ketidaksesuaian
34. Sarana Karantina
35. Prasarana Karantina
36. Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji
37. Sampel Surveilance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji
38. Sampel Surveilance Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji

## **Klaster 2. Manufaktur Berbasis Kelautan, yang termasuk ke dalam klaster ini apabila salah satunya mencakup:**

- A. Industri pengolahan komoditas perikanan dan kelautan
- B. Industri Galangan Kapal
- C. Industri Kimia dan Farmasi
- D. Industri Garam
- E. Konstruksi Kelautan
- F. Jasa manufaktur berbasis kelautan

### **A. Industri pengolahan komoditas perikanan dan kelautan**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat output sebagai berikut:

- 1) Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan
- 2) Sarana Keamanan dan Mutu Pangan
- 3) Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan
- 4) Rekomendasi kebijakan standar pengujian/pengujian keamanan dan mutu pangan (blue food)
- 5) Rekomendasi kebijakan uji terap dan metode pengujian/penjaminan keamanan dan mutu pangan (blue food)

### **B. Industri Galangan Kapal**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat output sebagai berikut:

- 1) Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN Dalam Rangka Mendukung Defend ID sebagai Industri Pertahanan Nasional yang Maju, Kuat, dan Mandiri
- 2) Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan
- 3) Industri kapal
- 4) Galangan kapal

### **C. Industri Kimia dan Farmasi**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat output sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri bioprospecting dari kelautan
- 2) Penyiapan regulasi

### **D. Industri Garam**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat output sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam
- 2) Verifikasi Penyaluran dan Distribusi Garam Industri ke Industri
- 3) Pendampingan Industri Pengolahan Garam Dalam Negeri Dalam Pemenuhan Spesifikasi Industri Aneka Pangan, Farmasi dan Kosmetik

### **E. Konstruksi Kelautan**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat output sebagai berikut:

- 1) Perencanaan konstruksi bangunan laut

### **F. Jasa manufaktur berbasis kelautan**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat output sebagai berikut:

- 1) Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi
- 2) Industri maritim yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing
- 3) Kebijakan Penyusunan Peta Jalan Nol Emisi Karbon Pada Industri Maritim
- 4) Evaluasi Kebijakan Peningkatan Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
- 5) Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas dan Strategis Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
- 6) Neraca Penyediaan dan Permintaan Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya Nasional

### **Klaster 3. Perdagangan, transportasi, dan logistik maritim, yang termasuk ke dalam klaster ini apabila salah satunya mencakup:**

#### **A. Perdagangan**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat output sebagai berikut:

1. Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan
2. Kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)
3. Kerjasama Pengembangan Ekspor Produk Primer
4. Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri
5. Koordinasi Fasilitas Ekspor dan Impor di Wilayah Perbatasan
6. Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
7. Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan
8. Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala Internasional dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
9. Referensi ekspor produk primer
10. Sosialisasi dan Diseminasi Pengembangan Ekspor Produk Primer
11. Adaptasi Produk Ekspor Primer
12. Koordinasi Fasilitas Ekspor dan Impor di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
13. Neraca Komoditas Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
14. Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan
15. Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri
16. Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Primer
17. Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional
18. Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri
19. Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
20. Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Subsidi Perikanan dan Perjanjian Perizinan Impor
21. Promosi produk rumput Laut Skala Internasional
22. Focus Group Discussion (FGD) Perdagangan Perbatasan
23. Forum Kerja Sama Perdagangan Perbatasan
24. Pemantauan/Pengawasan/Pengendalian Agensia Hayati, PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan dan lingkungan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran
25. Pemantauan/Pengawasan/Pengendalian spesies asing invasif untuk mengurangi penyebaran jenis asing ikan invasif di Indonesia melalui tempat pemasukan dan pengeluaran
26. Serifikasi Kesehatan/Karantina terhadap media pembawa penyakit hewan, penyakit ikan, dan organisme tumbuhan karantina kategori risiko sangat tinggi dan tinggi ke luar negeri (ekspor)
27. Serifikasi Kesehatan/Karantina dalam rangka fasilitasi registrasi (Approval Number) unit produk untuk persyaratan ekspor yang diakui otoritas kompeten negara mitra,
28. Serifikasi Kesehatan/Karantina terhadap masuknya media pembawa penyakit hewan, penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri (impor)
29. Serifikasi Kesehatan/Karantina terhadap media pembawa penyakit hewan, ikan, dan organisme tumbuhan karantina antarArea
30. Serifikasi Kesehatan/Karantina terhadap sarana Instalasi karantina ikan Pasca Impor pihak ketiga
31. Serifikasi Kesehatan/Karantina/Pengawasan dan pengendalian pakan impor dari kemungkinan ketidaksesuaian
32. Serifikasi Kesehatan/Karantina/Pengawasan dan pencegahan pangan impor dari kemungkinan ketidaksesuaian
33. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina dalam penyelenggaraan karantina ikan

## B. Transportasi dan Logistik

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat output sebagai berikut: 001 - Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional

1. Layanan Penilaian Kinerja Lingkungan Hidup di Pelabuhan
2. Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)
3. Peralatan Pemasaran
4. Kendaraan Pemasaran Ikan
5. Layanan Angkutan Tol Laut Prioritas Nasional
6. Sarana Distribusi Logistik Produk KP
7. Layanan Angkutan Ternak Prioritas Nasional
8. Layanan Angkutan Rede Prioritas Nasional
9. Layanan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Prioritas Nasional
10. Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam Penguatan Sinergi dan Integrasi BUMN Logistik
11. Development and Improvement of Indonesia Aids to Navigation
12. Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)
13. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Dobo
14. Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Patimban
15. Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Bau-Bau
16. Patimban Port Development Project (II)
17. Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Anggrek
18. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kilo (MYC 2025-2026)
19. *Replacement* Fasilitas Pelabuhan Sarmi
20. *Replacement* Fasilitas Pelabuhan Larea-Rea Sinjai (MYC 2025-2026)
21. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Raha
22. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026)
23. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Bungin
24. Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Salakan (MYC 2025-2026)
25. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Tepa
26. *Replacement* Fasilitas Pelabuhan Matutuang (MYC 2025-2026)
27. *Replacement* Fasilitas Laut Pelabuhan Kotabunan
28. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Lampia
29. *Replacement* Fasilitas Pelabuhan Laut Sapudi (MYC 2025-2026)
30. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lapuko
31. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mahaleta
32. *Replacement* Fasilitas Pelabuhan Marapokot (MYC 2025-2026)
33. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Ndao
34. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Eray
35. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mangga Dua
36. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mamuju
37. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Panarukan
38. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Keramaian
39. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalatoa
40. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Jinato
41. Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - Jalan Akses Pelabuhan Patimban
42. Pengembangan Pelabuhan

## **Klaster 4. Pariwisata, yang termasuk ke dalam klaster ini apabila salah satunya mencakup:**

### **A. Pariwisata Bahari dan Danau**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat output sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT
2. Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba – Kab. Toba
3. Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores – Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Danau Toba – Provinsi Sumatera Utara
5. UMKM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Usaha dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores – Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Penyelenggaraan dan Implementasi Kerjasama Nasional dan Internasional Politeknik Pariwisata Bali – Kab. Badung
7. Promosi dan Pemasaran Parekrif Badan Pelaksana Otorita Danau Toba – Provinsi Sumatera Utara
8. Produk Wisata dan Kegiatan (Events) di Kawasan Badan Otorita Labuan Bajo Flores yang di Publikasikan – Provinsi Nusa Tenggara Timur
9. Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Danau Toba – Provinsi Sumatera Utara
10. Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Labuan Bajo Flores – Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Kapal pesiar/wisata bahari dari luar negeri yang dipantau dan diperiksa karantina
12. Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Destinasi dan Penyelenggaraan Event di Destinasi Pariwisata Prioritas
13. Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan *Health and Wellness Tourism* di Sanur
14. Publikasi

## **Klaster 5. Bioteknologi dan Bioekonomi, yang termasuk ke dalam klaster ini apabila salah satunya mencakup:**

### **A. Bioteknologi dan Bioekonomi**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat *output* sebagai berikut:

1. Layanan Valuasi Ekonomi Pemanfaatan TSL dan Bioprospeksi
2. Pengembangan Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Spesies Liar
3. Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut
4. Masyarakat Pemanfaat Air Laut dan Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kompetensinya
5. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi dan Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara
6. Pemantauan dan Pencegahan keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Sumber Daya Genetik dari wilayah Indonesia

## **Klaster 6. Energi Terbarukan, yang termasuk ke dalam klaster ini apabila salah satunya mencakup:**

### **A. Energi Terbarukan**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat *output* sebagai berikut:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
3. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM)
4. Peta Potensi Energi Baru dan Terbarukan
5. *Survey* Potensi Energi Laut

## **Klaster 7. Penelitian dan Pendidikan, yang termasuk ke dalam klaster ini apabila salah satunya mencakup:**

### **A. Penelitian**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat *output* sebagai berikut:

1. Biota yang Terkonservasi
2. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Kelautan untuk Ekonomi Biru
3. Model Integrasi Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Kedaulatan Pangan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045

### **B. Pendidikan dan Pelatihan**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat *output* sebagai berikut:

1. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan
2. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi
3. Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
4. Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP
5. Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas / *Smart Fisheries Village* (SFV) lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
6. Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE
7. Diklat Industri Bidang KEBTKE
8. Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas / *Smart Fisheries Village* (SFV) lingkup Pelatihan Kelautan dan Perikanan
9. Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan
10. Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
11. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih
12. Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya
13. Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya
14. Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan
15. Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya
16. Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya
17. Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten
18. Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi
19. Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan
20. Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan
21. Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan
22. Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya
23. Kebijakan Program Pengembangan Ekonomi Biru

### **C. Data dan Informasi**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat *output* sebagai berikut:

1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Sarana Data Citra Satelit Radar
3. OM Sarana Data Citra Satelit Radar
4. Layanan Data Kelautan dan Perikanan
5. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

## **Klaster 8. Konservasi Laut, Rehabilitasi, dan Jasa Ekosistem, yang termasuk ke dalam klaster ini apabila salah satunya mencakup:**

### **A. Konservasi Laut dan Perairan**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat *output* sebagai berikut:

1. Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan
2. Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau *Appendic Cites* (kumulatif)
3. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
4. Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya
5. Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem
6. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - '*Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas*
7. Kawasan Konservasi Perairan yang Operasional (kumulatif)
8. Pemulihan Ekosistem Perairan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB
9. *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA
10. Pemantauan status, situasi dan peta sebaran hama dan penyakit ikan di wilayah Kawasan Sentra Produksi Pangan
11. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau (Tahap IV)
12. Pembangunan Pengaman Pantai Congot Kabupaten Kulonprogo
13. Pembangunan Pengaman Pantai di 3 (Tiga) Gili Kabupaten Lombok Utara
14. Pembangunan Pengaman Pantai di Kabupaten Kaur (Tahap II)
15. Pembangunan Pengamanan Pantai Bojongsalawe (Tahap III)
16. Pembangunan Pengaman Pantai AURI Kota Balikpapan
17. Pembangunan Pengaman Pantai Amurang Kabupaten Minahasa (Tahap II)
18. Pembangunan Pengaman Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

### **B. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut**

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat *output* sebagai berikut:

1. Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
2. Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Dokumentasi Data dan Informasi Potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Pemulihan Ekosistem Mangrove
5. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove
6. Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
7. Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
8. Infrastruktur Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
9. Padang Lamun/Terumbu Karang yang Dipulihkan
10. Pemantauan Kualitas Air Laut
11. Program Pantai Lestari
12. Fasilitas Penanganan Sampah di Wilayah Pesisir
13. Pemantauan Data dan Informasi Sampah Laut
14. Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi
15. Rehabilitasi Mangrove di 9 Wilayah

## C. Jasa Ekosistem

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat *output* sebagai berikut:

1. Dokumen NSPK Jasa Kelautan
2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi
3. Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
4. Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut
5. Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut
6. Rekomendasi Kebijakan Berusaha Jasa Kelautan
7. Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi

## D. Penataan Ruang Laut

Termasuk pada kategori ini apabila kegiatan tersebut terdapat *output* sebagai berikut:

1. Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut
2. Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan
3. Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
4. Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN
5. Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi
6. Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN
7. Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
8. Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN
9. Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)
10. Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan
11. Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di daerah
12. Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah
13. Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut
14. Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)





Kementerian PPN/  
Bappenas



# Pedoman Penandanaan Anggaran Ekonomi Biru

EDISI 1

